

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan system pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi stafa kuntansi yang ada.

Menurut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang telah meraih opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) terjadi di Tahun 2015,2016,dan 2018. BPK Perwakilan NTT menemukan adanya kecurangan dan ketidak patuhan terhadap peraturan

perundang-undangan pada Pemerintah Kota Kupang. Kesalahan yang terjadi di Tahun 2015 adalah adanya penyalagunaan kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di Tahun 2016 terdapat beberapa kecurangan yakni pertama, dana penyertaan modal pemerintah daerah Kota Kupang pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) maju sebesar Rp21.750.000.000,-, Kedua, penerimaan sewa alat berat selama periode 2016 belum terima sebesar Rp80.250.000,- dan ketiga, terdapat kekurangan fisik pekerjaan bangunan gedung dan jalan sebesar Rp296.405.219,-.(sumber siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi NTT)

Fakta yang terjadi di lapangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2018. Opini WTP ini disampaikan BPK RI dalam agenda Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin 27 Mei 2019 yakni Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018. Dari pemeriksaan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya, penatausahaan asset Personil, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D) belum tertib. Denda keterlambatan penyelesaian atas

dua pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) belum dikenakan minimal sebesar Rp.2,56 Milyar dan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp.13,95 Milyar, dan yang ketiga adalah, kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang sebesar Rp.247,76 Milyar. (sumber siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi NTT)

Fakta lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada enam pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang. Dua entitas memperoleh opini Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Belu, sedangkan empat entitas lainnya memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Secara umum, akun-akun yang menjadi pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini WDP adalah Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Aset Tetap.

Selain fenomena di atas adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah : Analisis Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan deskripsi mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB. Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian hingga tahun 2014. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur harus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan riset dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini Wajar dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur disebabkan adanya temuan kasus ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan deskripsi mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011-2015 yang dimana pada tahun 2011 mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan opini tersebut yang kasus temuan BPK adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya pelaksanaan SPI.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berdasarkan Opini BPK”

1.3. Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian yang dirumuskan dari rumusan masalah yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang berdasarkan opini BPK?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui langka-langka yang diambil oleh pemerintah kota kupang untuuk memperbaiki kualitas laporan keuangan.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Akademik

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sector publik yang berkaitan dengan analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan opini BPK dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah kota kupang.